

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina R. *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, cetakan pertama, 2003).
- Amiruddin, Asikin Z., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, cetakan ke-12, 2021).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* (KBBI), (Indonesia: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2016)
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, MN, Thomson Reuters, 2014)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- De Mauro, A., Greco, M., & Grimaldi, M., A formal definition of Big Data based on its essential features, (Library Review, 2016)
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Laporan Tahunan 2020, (Jakarta: Dirjen Aptika, 2020).
- Freeman, Michael, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, (London, Thomson Reuters (Legal) Limited Ninth Edition, 2014)
- Fitzgerald, P.J., *Salmond on Jurisprudence*, Twelve Edition, (Delhi: Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd., 2002).
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- Imran Gulamhuseinwala, *UK FinTech: on the cutting edge*, (Great Britain: Ernst & Young, 2016)
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*, Terjemahan: Nurhadi M.A. (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007)
- Jonker Sihombing, *Otoritas Jasa Keuangan: Konsep, Regulasi & Implementasi*, (Jakarta: Ref Publisher, 2012)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Komnas HAM, 2009).
- LG. Saraswati et.al, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, (Jakarta: Filsafat UI Press, cetakan pertama, 2006)
- Nenny Rianarizkiwati, *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi*, (Depok: Infermia Publishing, 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Cetakan ke-1, Desember 2017).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*, (Jakarta: OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-1, Mei 2017).

- Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinan) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), “*Laporan Tahunan 2020 mengenai Hasil Monitoring Keamanan Siber*”, (Jakarta: BSSN, 2020)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Penerbitan dan Percetakan PT Balai Pustaka (Persero), cetakan 41, 2014).
- Raymond Wacks, *Privacy and Media Freedom*, (Oxford: Oxford University Press, 2013),
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Judul asli Human Rights, Penerjemah A. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Toeri dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, cetakan ketiga, 2020).
- Todung M. Lubis, *Mencari Hak Asasi Manusia: Dilema Politik Hukum Indonesia Masa Orde Baru 1966-1990*, (Yogyakarta: Penerbit Circa, 1993).
- Tommy H. Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2007).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Kedua UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2000) dan Perubahan Keempat UUD 1945 ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002 (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2002) (UUD 1945).
- Ketetapan MPR (Tap MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196) (UU PDP).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) (UU OJK).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) (UU HAM).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diundangkan tanggal 10 Oktober 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185) (PP PTSE).
- Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270).
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang diundangkan pada tanggal 20 Januari 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) (RPJMN 2020-2024).
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang diundangkan pada tanggal 7 September 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185) (PerPres SNKI 2016)
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment Indonesia.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang diundangkan tanggal 24 November 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang diundangkan tanggal 21 Mei 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544) (Permen Kominfo PSP Lingkup Privat)
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permen Kominfo PDP)
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1826/SJ Tahun 2013 tentang Pemanfaatan e-KTP Dengan Menggunakan *Card Reader*.
- Peraturan OJK Nomor 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 2022 dan mencabut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P 2022).
- Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 18 April 2022 (POJK Perlindungan Konsumen).
- Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang diundangkan tanggal 31 Desember 2018 (POJK Crowdfunding 2018).

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328) (POJK IKD).

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diundangkan pada tanggal 28 Desember 2016 (POJK P2P 2016).

Surat Edaran OJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang *Regulatory Sandbox*.

Surat Edaran OJK Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital ditetapkan pada 5 November 2019 (SEOJK Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD).

Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2014 (SE-OJK 14/2014).

Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Perjanjian Baku yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2014 (SE-OJK 13/2014).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1720K/Pdt/1986, 18 Agustus 1988.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst.

Jurnal Internasional/Jurnal Nasional

Agung K. Sihombing dan Muhammad N. Mahatmanta, “*Safe Harbor 4.0: Exemption of Platform Providers Liability Under Indonesian Cyber Laws*”, ALSA Law Journal of Indonesia, Vol.1, hal 35-56, 2019. Diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/341829320>. Diakses pada 21 Oktober 2022.

David Lee Kuo Chuen dan Ernie G.S. Teo, “*Emergence of FinTech and the LASIC Principles*”, The Journal of Financial Perspectives: Fintech, Vol. 3, Issue 3, January 2015, DOI: 10.2139/ssrn.2668049 diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/314197601>

Islah Khikmatul., “Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Big Data Untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah”, Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 5 No.1 September 2018, hal.130 -138. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/272>. P- ISSN 2355-309X ; E-ISSN 2622-8696

Jerry Kang, “*Information Privacy in Cyberspace Transactions*”, Stanford Law Review, Vol. 50, No. 4, April 1998, <https://doi.org/10.2307/1229286>

Rosadi S.D., “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, Jurnal Unpad Sosiohumaniora, Vol. 19 No. 3, November 2017, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.11380>.

Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, “*The Right to Privacy*”, Harvard Law Review, Vol.4, No. 5 Desember 1890.

Hasil Penelitian

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “Laporan Survei Profil Internet Indonesia APJII 2022”, Laporan Hasil Survei, Jakarta: APJII, Juni 2022.
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020”, Laporan Tahunan, Jakarta: Kementerian Kominfo, 2021
- Google, Temasek, dan Bain & Company, “*e-Conomy SEA 2021 Roaring 20s: The SEA Digital Decade*”, (Singapura: eConomy SEA, November 2021).
- International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), “*The Bali Fintech Agenda*”, IMF Policy Paper, Oktober 2018, hal.12. Diunduh dari <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2018/pp101118-bali-fintech-agenda.ashx>. Diakses pada 21 Oktober 2022.
- Kementerian Kominfo, “*Persepsi Masyarakat Atas Perlindungan Data Pribadi – Survei Nasional Tahun 2021*”
- Kementerian Perindustrian, *Making Indonesia 4.0*, 2018.
- Marlene Amstad, “*Regulating Fintech: Objectives, Principles, and Practices*”, (Tokyo, Asian Development Bank Institute, 2019), <https://www.adb.org/publications/regulating-fintech-objectives-principles-practices>, diakses pada 21 Oktober 2022
- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), “*A Roadmap toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy – Report for the G20 Digital Economy Task Force*”, (Saudi Arabia: OECD, 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Tahunan 2016”, Laporan Tahunan, Jakarta: OJK, 11 Agustus 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Tahunan 2021”, Laporan Tahunan, Jakarta: OJK, 25 Juli 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, “*Group Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan: Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital Per September 2022*”, Laporan Bulanan, Jakarta: OJK, 2022.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, “*Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital*”, Kementerian Hukum dan HAM RI, Juni 2022, hal. 56. Diunduh dari https://bphn.go.id/dpage/reports/res_anev. Diakses pada 28 Oktober 2022.
- Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, “Laporan Tahunan 2020: Hasil Monitoring Keamanan Siber 2020”, Laporan Tahunan, Jakarta, Badan Siber dan Sandi Negara, 2021.
- Wahyudi Djafar, “*Big Data and the Practice of Large Scale Data Collection in Indonesia: An Introduction to Understanding the Actual Challenges of the Protection of the Right to Privacy*”, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2017).
- Wahyudi Djafar et all, “Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.

Situs Kementerian atau Lembaga Pemerintah

- Beranda OJK, “Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/SNLIKInklusi>, diakses pada 25 Agustus 2022.
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, “e-Government di Provinsi Banten”, <https://diskominfo.bantenprov.go.id/post/e-government-di-provinsi-banten>, Diskominfo.bantenprov.go.id, Maret 2020, diakses pada 28 Februari 2022.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Implementasi Big Data Pada Instansi Pemerintah”, <https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4621-implementasi-big-data-pada-instansi-pemerintah>, diakses pada 28 Februari 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Peta Jalan Indonesia Digital untuk Mendukung Generasi Muda Menjadi *Game Changer* di Era Digital”, Siaran Pers, 18 September 2021, <https://ekon.go.id/unduh/publikasi/3314/peta-jalan-indonesia-digital-untuk-mendukung-generasi-muda-menjadi-game-changer-di-era-digital>, diakses pada 26 Februari 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Memasuki Era Society 50 Menko Airlangga Sampaikan untuk Membangun Talenta Digital dan Meningkatkan Literasi Digital” <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3397/memasuki-era-society-50-menko-airlangga-sampaikan-untuk-membangun-talenta-digital-dan-meningkatkan-literasi-digital>, Ekon.go.id, Oktober 2021, diakses pada 27 Februari 2022.
- Kementerian Kominfo, “Presiden Jadikan Making Indonesia 4.0 Sebagai Agenda Nasional”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/12847/presiden-jadikan-making-indonesia-40-sebagai-agenda-nasional/0/berita>, Kominfo.go.id, Berita Pemerintahan April 2018, diakses pada 26 Februari 2022.
- Kementerian Kominfo, “Apa itu Industri 4.0 dan Bagaimana Indonesia Menyongsongnya”, https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media, Kominfo.go.id, Sorotan Media Februari 2019, diakses pada 26 Februari 2022.
- Kementerian Kominfo, “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Kawasan Indonesia Timur Segera Terwujud”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/13279/pemerataan-pembangunan-infrastruktur-telekomunikasi-kawasan-indonesia-timur-segara-terwujud/0/sorotan_media, Kominfo.go.id, Sorotan Media, Juni 2018, Diakses pada 26 Februari 2022.
- Kementerian Kominfo, “Implementasi Penerapan E-Government, Sistem Pemerintahn Riau yang Moderen”, <https://kominfo.go.id/content/detail/8522/implementasi-penerapan-e->

[ext=Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20\(SNLIK\)%20merupakan%20survei%20berskala,dan%20inklusi%20keuangan%20masyarakat%20Indonesia](#), diakses pada 31 Oktober 2022.

Sekretariat Kabinet, “Presiden Jokowi: Potensi Ekonomi Digital Indonesia Sangat Prospektif”, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-potensi-ekonomi-digital-indonesia-sangat-prospektif/>, Setkab.go.id, 1 Maret 2022

Internet

Adrianus Octaviano, “Aturan Fintech Lending Resmi Keluar, Akankah OJK Mencabut Moratorium?”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/aturan-fintech-lending-resmi-keluar-akankah-ojk-mencabut-moratorium>, Kontan.co.id, 18 Juli 2022, diakses pada 31 Oktober 2022.

Adrianus Octaviano, “OJK Menyebut Pencabutan Moratorium Fintech Lending Tak Mudah”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-menyebut-pencabutan-moratorium-fintech-lending-tak-mudah>, Kontan.co.id, 14 September 2022, diakses pada 31 Oktober 2022.

Ahmad M. Ramli, “Siapa Bertanggung Jawab Jika Terjadi Kegagalan Perlindungan Data Pribadi”, Kompas.com, 3 November 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/03/092807165/siapa-bertanggung-jawab-jika-terjadi-kegagalan-perlindungan-data-pribadi?page=all>, diakses pada 4 November 2022.

Andreas W. Finaka, “Jumlah Pulau di Indonesia Capai 17.000!”, [https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pulau-di-indonesia-capai-17000#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Pemerintah%20mencatat%20jumlah,Names%20\(UNGEKN\)%20tahun%202022.](https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pulau-di-indonesia-capai-17000#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Pemerintah%20mencatat%20jumlah,Names%20(UNGEKN)%20tahun%202022.), Indonesiabaik.id, diakses pada 26 Februari 2022.

Antara Kantor Berita Indonesia, “AFPI: ISO 27001 salah satu persyaratan fintech peroleh izin usaha OJK”, Antaranews.com, 16 Mei 2019, <https://www.antaranews.com/berita/872535/afpi-iso-27001-salah-satu-persyaratan-fintech-peroleh-izin-usaha-ojk>, diakses pada 4 November 2022.

APJII, “Kasus Data Pribadi yang Selalu Bocor”, Buletin APJII, edisi 94, September 2021.

Berita Satu, “Menkop UKM Ungkap Penyebab Banyak UMKM Online Tidak Bisa Bertahan Lama”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/920085/menkop-ukm-ungkap-penyebab-banyak-umkm-online-tidak-bisa-bertahan-lama>, tanggal terbit: 24 April 2022, diakses pada 28 Juni 2022.

Caesar Akbar, “6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”, <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>, TEMPO.CO, Jakarta, diakses pada 25 September 2022,

Cindy Annur, “10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak (Kuartal III-2022)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>, Databoks, 2022. Diakses pada 08 November 2022.

CNN Indonesia, “Elsam Sebut Beberapa Masalah Pinjol Ada di DPR dan Bocor Data”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210910174052-78->

- [692674/elsam-sebut-beberapa-masalah-pinjol-ada-di-dpr-dan-bocor-data](#), September 2021, diakses pada 6 Maret 2022.
- Fitri N.H., *Isu Data Bocor, DJP Pastikan Data Wajib Pajak Aman*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/isu-data-bocor--djp-pastikan-data-wajib-pajak-aman-lt62224b9883167/?page=2>, Hukum Online.com, Maret 2022, diakses pada 6 Maret 2022.
- Infojateng, “Optimalisasi Layanan Publik Lewat *Big Data* dan *E-Government*”, <https://infojateng.id/read/8876/optimalisasi-layanan-publik-lewat-big-data-dan-e-government/>, diakses pada 28 Februari 2022.
- HukumOnline, “Revolusi Data untuk Rumuskan Kebijakan Publik”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/revolusi-data-untuk-rumuskan-kebijakan-publik-lt58ac19c49efaa>, HukumOnline, Februari 2017, diakses pada 28 Februari 2022.
- Karnadi A., “Pengguna Media Sosial di Indonesia Mencapai 170 juta”, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-mencapai-170-juta>, DataIndonesia.id, Desember 2021, diakses pada 26 Februari 2022.
- Kusnandar V.B., “Pengguna Internet Indonesia Peringkat Ke-3 Terbanyak di Asia (Mar 2021)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia#:~:text=Berdasarkan%20data%20internetworldstats%2C%20pengguna%20internet,pengguna%20internet%20terbanyak%20di%20Asia.>, Databoks, Oktober 2021, diakses pada 26 Februari 2022..
- Maya C.R., “Kebocoran Data, Aplikasi PeduliLindungi Perlu Diaudit dan Perbaikan”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/05/163000865/kebocoran-data-aplikasi-pedulilindungi-perlu-diaudit-dan-perbaikan?page=all>, Kompas.com, September 2021, diakses pada 27 Februari 2022.
- M. Agus Yozami, “2 Kebijakan yang Dibutuhkan Industri Fintech”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/2-kebijakan-yang-dibutuhkan-industri-fintech-lt5dc0080c78637?page=all>, diakses 21 Oktober 2022.
- Mochamad J. Rizki, “Regulatory Sandbox Dinilai Kurangi Risiko Ketiadaan UU Perlindungan Data Pribadi”, Hukum Online, 18 Oktober 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulatory-sandbox-dinilai-kurangi-risiko-ketiadaan-uu-perlindungan-data-pribadi-lt616d313bf0ec5?page=2>, diakses pada 30 Oktober 2022.
- Nanda N. Putra, “Regulator Berpikir Keras Merespons Inovasi Bisnis Fintech”, Hukum Online, 23 Oktober 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulator-berpikir-keras-merespons-inovasi-bisnis-fintech-lt59edda54ce5fa?r=1&p=1&q=SEOJK%20Asosiasi%20fintech&rs=1847&re=2022>, diakses pada 29 Oktober 2022.
- Novita P. Bestari, “Jangan Pinjam di 56 Pinjol ini, Izinnya Sudah Dicabut OJK!”, CNBC Indonesia, 21 Maret 2022,

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220318172127-37-324030/jangan-pinjam-di-56-pinjol-ini-izinnnya-sudah-dicabut-ojk>, diakses 7 November 2022

Oktarina P.S., Muhamad K., “Hakim PN Jakpus Tolak Gugatan KKI”, <https://cyberthreat.id/read/9069/Data-91-Juta-Akun-Tokopedia-Bocor-Hakim-PN-Jakpus-Tolak-Gugatan-KKI>, Cyberthreat.id, November 2020, tanggal diakses: 27 Februari 2022.

Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Nomor 002/SK/COC/INT/IV/2020, Perihal: Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI tahun 2020, dikeluarkan di Jakarta, 29 April 2020. <https://afpi.or.id/articles/detail/pedoman-perilaku-afpi#>, diakses pada 29 Oktober 2022.

Underwood D., “*Industry 4.0: Key Design Principles*”, <https://www.automate.org/editorials/industry-4-0-key-design-principles>, Association for Advancing Automation, April 2017.

United Nations, “*Human Rights*”, <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights#:~:text=Human%20rights%20include%20the%20right,to%20these%20rights%2C%20without%20discrimination.>, diakses pada 5 Oktober 2022.

UN E-Government Knowledgebase, *Data Country Information*, <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>, United Nations, diakses pada 28 Februari 2022.

World Bank, “*Digital Financial Inclusion*”, <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/publication/digital-financial-inclusion>, diakses pada 21 Oktober 2022

Perjanjian Atau Konvensi Internasional

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), *ASEAN Human Rights Declaration and Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)*, (Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2013) <https://asean.org/asean-human-rights-declaration/>, diakses pada 7 Oktober 2022.

European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the *protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data*, and repealing Directive 95/46/EC [2016] OJ L119/33, <https://gdpr-info.eu/>, diakses pada 7 Oktober 2022

European Parliament, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, 2000, OJ C364/10. Diunduh melalui https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, diakses 7 Oktober 2022.

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), *A Roadmap toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy – Report for the G20 Digital Economy Task Force*, (Saudi Arabia: OECD, 2020).

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Guidelines governing the protection of privacy and transborder flows of personal data*, annex to Recommendation of the Council of 23 September 1980, <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesonthe protectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm#part1>, diakses pada 7 Oktober 2022
- United Nations General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *United Nations*, 10 December 1948, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada 15 Oktober 2022.
- United Nations General Assembly, *International Covenant of Civil and Political Rights*, *United Nations*, 16 December 1966. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, diakses pada 15 Oktober 2022.
- United Nations General Assembly, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *United Nations*, 16 December 1966. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf>, diakses pada 15 Oktober 2022.
- United Nations General Assembly, Resolution 217A of 10 December 1948, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, (United Nations, Illustrated edition, 2015).
- United Nations General Assembly Resolution 68/167 of 18 December 2013, *The Right to Privacy in the Digital Age*, on the report of the Third Committee (A/68/456/Add.2), <https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/68/456/Add.2&Lang=E>, diakses pada 21 Oktober 2022.

Seminar

Seminar “Babak Baru dan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat” diadakan oleh Hukumonline pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 bertempat di Century Park Hotel (Seminar Hukumonline UU PDP).

1. Sesi Pertama mengenai Pemahaman Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pembicara pertama Teguh Arifiyadi, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo membawakan “Implementasi penerapan UU PDP”, pembicara kedua R. Narendra Jatna membawakan “Klasifikasi, Delik, Sanksi, dan Ancaman Pidana dalam UU PDP”.
2. Sesi kedua mengenai Tantangan dan Manajemen Risiko pasca disahkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pembicara pertama Ferry Indrawan, Koordinator Perundang-undangan Deputy I, BSSN, membawakan “Kewenangan teknis dalam penerapan keamanan data pribadi pasca UU PDP”, dan pembicara kedua Danny Kobrata, Vice Chairmen

Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) membawakan “Hak, Kewajiban, Peluang, dan Mitigasi resiko pasca disahkannya UU PDP oleh pelaku usaha”.

